

ANALISIS PENGARUH IPM, PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, DAN UMK TERHADAP POSISI PEREKONOMIAN DAERAH (Studi Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur)

Ida Farida. A. Bernadina

Abstract

Topic of this research is analysis of HDI's impact, Local Government Expenditures and minimum wage of city/regency toward regional economic position. Moreover, this research determine several variables such as: (1) the effect of HDI toward the regional economy position, (2) the influence of local government expenditure toward the regional economy position, (3) the effect of City / Regional Minimum Wage toward position the regional economy position, and (4) the effect of HDI, government expenditure and City / Regency Minimum Wage toward the region's economy position. This research using descriptive statistical analysis tools that consists of Klassen's Regional Typology Model, LQ and Multinomial logit analysis model. By Klassen's typology, it is known each positions of region in East Java Province, where most of area are include to the fourth quadrant with most of basis sector is an agriculture.

Keywords: HDI, Local Government Expenditure, Regional Minimum Wage, Regional economy position, Klassen's Typologi

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perekonomian daerah (regional), dimana perekonomian daerah ini sendiri bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah (Arsyad: 2010). Akan tetapi kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kesenjangan ekonomi, akibat kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan, yang telah menyebabkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat. Realitas tersebut dapat kita lihat pada Propinsi Jawa Timur, di mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar wilayah terjadi kesenjangan.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir sangat potensial dan cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Sehingga dapat dipastikan bahwa Provinsi Jawa Timur mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.

Akan tetapi Pembangunan tidak selalu berjalan secara sistemik. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sedangkan daerah lain mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Pertumbuhan yang tidak merata dan distribusi pendapatan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat merupakan

Alamat Korespondensi:

Ida Farida. A. Bernadina, Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

kondisi mayoritas pembangunan daerah di Jawa Timur.

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan daerah, maka daerah harus mengenal potensi yang dimiliki dan memberdayakan berbagai sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Pembangunan yang di dasarkan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru berbasis lokal (Blakely:1994) sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali setiap potensi yang ada di wilayahnya, karena bagaimana pun melakukan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas konsekuensinya harus difokuskan pada pembangun-an sektor-sektor yang memiliki keunggulan dari sektor yang lainnya.

Untuk ketimpangan antar wilayah sendiri akan terlihat nyata apabila dilakukan identifikasi posisi perekonomian melalui Tipologi Klassen (Kuncoro, 2001) yang membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growht*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997, Kuncoro, 1993, Hill, 1989).

Dalam penelitian ini beberapa faktor yang akan di teliti dalam kemungkinan untuk mempengaruhi peluang posisi perekonomian suatu daerah adalah IPM, Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagai variabel independen.

Lisnawati (2007) menyebutkan bahwa “Dalam konteks pembangunan daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah.” Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah.

Menurut UU No. 6 Tahun 1997 tentang APBN, pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pengeluaran rutin pemerintah menjadi penting dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan.

Sedangkan UMK yang semakin tinggi merupakan salah satu hal yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Studi Waisgrais (2003) menemukan bahwa kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi di pasar tenaga kerja. Kemudian studi Askenazy (2003) juga menunjukkan bahwa upah

minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menganalisis pengaruh IPM, Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap peluang posisi perekonomian suatu daerah.

Metode Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa

Tabel 1. Tipologi Klassen

pendapatan perkapita Laju Pertumbuhan	$Y_i < Y$	$Y_i > Y$
$r_i > r$	<i>high growth but low income (Kuadran III)</i>	<i>high growth and high income (Kuadran I)</i>
$r_i < r$	<i>low growth and low income (Kuadran IV)</i>	<i>high income but low growth (Kuadran II)</i>

Model yang digunakan selanjutnya adalah model *regresi logistik, multinomial*, dengan spesifikasi model yang dimodifikasi dari model yang dipakai Kuncoro (2001) sebagai berikut.

$$D4 = \beta_0 + \beta_1 IPM + \beta_2 PENG + \beta_3 UMK.....$$

Hasil Dan Pembahasan

Kuadran 1 : Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Mlang, Kota Probolinggo, Kota Madiun dan Kota Surabaya

Kuadran II : Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kota Batu

Kuadran III : Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten

Timur sebagai variabel terikat (Y), IPM sebagai variabel bebas (X1), Pengeluaran Pemerintah Daerah (X2), dan UMK (X3) dengan studi populasi.

Analisis pertama yang digunakan adalah tipologi klassen, dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, dengan kriteria sebagai berikut.

Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar.

Kuadran IV : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep.

Sebagian besar kabupaten di provinsi Jawa Timur berada di kuadran IV, hal ini mencerminkan tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi di daerah Jawa Timur masih relatif tinggi.

Sedangkan Persamaan model multinomial yang di dapat adalah :

$$\ln (p_1/p_0) = 10.4044 + 2.31969 IPM + 1.828837 PENG + 1.90579 UMK$$

$$\ln (p_2/p_0) = 19.7671 + 1.38748 \\ IPM + 1.22562 PENG + \\ 3.12788 UMK$$

$$\ln (p_3/p_0) = 32.2391 + 2.41361 \\ IPM + 1.77969 PENG + \\ 2.10824 UMK$$

Model yang terdiri dari seluruh variabel dengan *Likelihood ratio test* signifikan secara statistik dimana $\text{sig } 0,0000 < 0,05$. Dengan demikian dapat diputuskan untuk menggunakan model lengkap dalam analisis ini. Kemudian pada hasil analisis di atas *P-value* untuk semua variabel independen pada model 1, 2, dan 3 adalah signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa:

Variabel IPM signifikan berpengaruh secara positif pada posisi daerah cepat maju dan tumbuh cepat. Sehingga setiap peningkatan pada IPM akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang posisi daerah menjadi cepat maju dan cepat tumbuh sebesar 10.17252 kali dibanding peluang menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak dan H1 tidak ditolak.

Variabel Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah signifikan berpengaruh secara positif terhadap posisi daerah cepat maju dan tumbuh cepat. Sehingga setiap peningkatan pada Pengeluaran rutin pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang daerah menjadi cepat maju dan cepat tumbuh sebesar 6.22664 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak dan H1 tidak ditolak.

Variabel UMK signifikan berpengaruh secara positif terhadap posisi daerah cepat maju dan tumbuh cepat. Sehingga setiap peningkatan

pada UMK akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang daerah menjadi cepat maju dan cepat tumbuh sebesar 6.724718 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak dan H1 tidak ditolak.

Variabel IPM signifikan berpengaruh secara positif pada posisi daerah maju tapi tertekan. Sehingga setiap peningkatan pada IPM akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang daerah menjadi maju tapi tertekan sebesar 4.00474 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak dan H1 tidak ditolak.

Variabel Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah signifikan berpengaruh secara positif terhadap posisi daerah maju tapi tertekan. Sehingga setiap peningkatan pada Pengeluaran rutin pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang daerah menjadi maju tapi tertekan sebesar 3.406277 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak dan H1 tidak ditolak.

Variabel UMK signifikan berpengaruh secara positif terhadap posisi daerah maju tapi tertekan. Sehingga setiap peningkatan pada UMK akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang daerah menjadi maju tapi tertekan sebesar 22.8255 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak dan H1 tidak ditolak.

Variabel IPM signifikan berpengaruh secara positif pada posisi daerah berkembang cepat. Sehingga setiap peningkatan pada IPM akan berpengaruh terhadap

meningkatnya peluang daerah menjadi berkembang cepat sebesar 11.17422 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_1 tidak ditolak.

Variabel Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah signifikan berpengaruh secara positif terhadap posisi daerah berkembang cepat. Sehingga setiap peningkatan pada Pengeluaran rutin pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang daerah menjadi berkembang cepat sebesar 5.92801 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_1 tidak ditolak.

Variabel UMK signifikan berpengaruh secara positif terhadap posisi daerah berkembang cepat. Sehingga setiap peningkatan pada UMK akan berpengaruh terhadap meningkatnya peluang daerah menjadi berkembang cepat sebesar 8.23373 kali dibanding menjadi daerah relatif tertinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_1 tidak ditolak.

Strategi:

Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran ekonomi Daerah Cepat Maju dan Tumbuh Cepat dengan cara: Mengoptimalkan pengembangan daerah melalui peningkatan nilai ekonomis daerah, meningkatkan kinerja sektor unggulan melalui sarana dan prasarana pendukung proses produksi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung, mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif., menjalin kerjasama dengan pihak investor,

terkait pemberian kredit/modal usaha, meningkatkan kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan pertumbuhan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur

Strategi:

Untuk daerah pada kuadran II dilakukan strategi dengan peningkatan sistem keterkaitan antara kantong-kantong produksi utama dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sektor pertanian dengan cara sebagai berikut: Memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agribisnis dan agroindustri, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar ekspor, memantapkan pengembangan pertanian yang terdiri dari lembaga tani dan lembaga keuangan.

Strategi:

Karena pada kuadran III sebagian daerah terpengaruh dengan transisi dari sektor pertanian ke industri sehingga menciptakan kesenjangan pendapatan yang berkaitan pada pendapatan perkapita yang rendah, maka strategi yang diusulkan adalah Mengembangkan industri yang mengolah hasil-hasil agro, mengatur kembali (deregulasi) ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah-daerah yang memiliki orientasi pengembangan industri, meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya.

Strategi :

Pada daerah kuadran IV dengan mempercepat perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal dengan cara sebagai berikut: mengembangkan potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan tertinggal, menginputkan sub sektor strategis di kawasan tertinggal sebagai pemacu pertumbuhan wilayah, menyediakan infrastruktur strategis sebagai pemacu pertumbuhan wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung, meningkatkan dukungan kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak, dan peningkatan program-program pembangunan strategis.

Kesimpulan Dan Saran

Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa posisi perekonomian masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat di kategorikan dalam empat kuadran, dimana sebagian besar daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur berada pada kuadran empat, yaitu daerah relatif tertinggal. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi daerah masih menjadi masalah besar dalam pembangunan ekonomi provinsi Jawa Timur (kuadran I, II, III, atau IV).

Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa IPM mempunyai pengaruh positif dalam menentukan peluang posisi daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan pada IPM akan berakibat pada naiknya peluang suatu daerah untuk berada pada posisi perekonomian tertentu (kuadran I, II, III, atau IV).

Pengeluaran pemerintah daerah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh positif dalam menentukan peluang posisi daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan pada Pengeluaran Pemerintah Daerah akan berakibat pada naiknya peluang suatu daerah untuk berada pada posisi perekonomian tertentu (kuadran I, II, III, atau IV).

UMK mempunyai pengaruh positif dalam menentukan peluang posisi daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan pada UMK akan berakibat pada naiknya peluang suatu daerah untuk berada pada posisi perekonomian tertentu (kuadran I, II, III, atau IV).

IPM, Penegeluaran pemerintah daerah dan UMK mempunyai pengaruh positif dalam menentukan peluang suatu daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan pada ketiga variabel tersebut akan berakibat pada naiknya peluang suatu daerah untuk berada pada posisi perekonomian tertentu (kuadran I, II, III, atau IV).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Untuk memacu perekonomian kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur, maka pemerintah daerah sebaiknya fokus pada sektor unggulan, terutama pada sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dengan demikian akan meningkatkan sebagian besar kesejahteraan masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja.
2. Alokasi anggaran untuk sektor unggulan perlu ditingkatkan, mengingat sebagian besar belanja pemerintah masih digunakan untuk gaji pegawai.
3. Untuk penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi sebaiknya

- di dasarkan pada hasil analisis sektoral
4. Perlu adanya pengawasan lebih dalam dalam menerapkan kebijakan pemerintah daerah terkait bidang pendidikan dan kesehatan agar bisa lebih tepat sasaran dan merata sehingga benar-benar bisa membawa dampak pada meningkatnya kualitas SDM yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
 5. Perlu adanya perlindungan yang jelas terhadap kebijakan UMK sehingga dapat melindungi kesejahteraan masyarakat daerah
 6. Terus meningkatkan infrastruktur (sarana dan prasarana) berbagai sektor di daerah guna mewujudkan struktur perekonomian yang dinamis, merata dan terus berkembang di masa depan
 7. Mewujudkan keterkaitan ekonomi antar sektor dan wilayah melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dengan menggunakan pendekatan wilayah melalui pengembangan beberapa wilayah pembangunan.

Daftar Rujukan

- Adisasmita. H.R., 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Agusalim. 2007. *Peran Anggaran Pemerintah Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan di Indonesia. Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10 No. 1.
- Alfirman, Luky dan Edy Sutriyono. 2005. *Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression*. Jurnal Keuangan Publik
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ke-4, Cetakan Pertama, Yogyakarta: bagian Penertiban STIE, YPKN.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Askenazy, Philippe. 2003. *Minimum Wage, Export, and Growth. European Economic Review* 47 (2003), pp 114 – 167.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Chemingui, Mohamed Abdelbasset. 2007. *Public Spending and Poverty Reduction in an Oil based Economy: The Case of Yemen*. Revised: January
- Cheng, Benjamin S. And Lai, Tin Wei. (1997). *Government Expenditure and Economic Development in South Korea : A VAR Approach*. Journal of economic Development, Vol. 22, Number 1
- Badrudin, Rudi, 1999, *Lembaga Keuangan Bank*, STIE YPKN, Yogyakarta
- Baltagi, H.B. 2001. *Economics Analysis of Panel Data*. Great Britain, Biddles Ltd.
- Bappenas. 2005. *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Millenium Indonesia*. Bappenas. Jakarta.
- Fan, Shenggen. 2000. *How Does Public Spending Affect Growth and Poverty? The Experience of China*. Paper submitted to 2nd annual

- Global Development Network Conference*. Tokyo, Japan.
- Dogan, Ergun and Tang, Tuck Cheong. (2006). *Government Expenditure and National Income: Causality test for Five South East Asian Countries*. International Business and Economics Research Journal.
- Firdausy, C.M. 1998. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- Lisnawati, 2007, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Jakarta. Harapan.
- Ghalia, Khalifan H. (1997). *Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia*. Journal Of Economic Development, Vol. 22 Number 2.
- Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Glasson, Jhon, 1990. *Pengantar Perencanaan Regional (Terjemahan)*. LPFE-UI, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N. Dan Porter, Dwn C.2010. *Basic Econometrics 5th ed. Mardanugraha, Eugenia (terj). Dasar – Dasar Ekonometrika Edisi 5*. Salemba Empat. Jakarta
- Kadariah, 1985. *Ekonomi Perencanaan*. LPEE-UI, Jakarta.
- Kuncoro. M., 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuznets. S., 1955. *Economic Growth and Income Inequality*. *American Economic Review (Maret)*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Loizides, Jhon and Vamvoukas, George. (2005). *Government Expenditure and Economic Growth : Evidence from Trivariate Causality Testing*. Journal of Applied Economics. Vol. VIII, No.1
- Gujarati, D.N. 2010. *Basic Econometrics*. Third Edition. Mc. Graw Hill. New York.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Mangkoesoebroto, G. 2001. *Ekonomi Publik*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Nachrowi, D.N. dan Hardius, U. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika : Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2001, *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta
- Prishardayo, Bambang. 2008. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005*. JEJAK, Volume 1, Nomor 1
- Papalaya, E. 2004. *Rekonstruksi Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Pindyck dan Rubinfeld. 1998. *Econometric Models and Economic Forecasts Fourth Edition*. Mc Graw-Hill Comp. Singapura.
- Pressman, R., 2000. *Software Engineering – A Practitioner's Approach, European adaptation by D. Ince, 5th edn*. London: McGraw-Hill International.
- Rahmanta. 2006. *Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan di Sumatera Utara : Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ekonomi, Manusia, dan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik. Vol. 7 No. 1. Jakarta.
- Richardson, Harry W., 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang*, Jakarta, LPFE-UI.
- Riyanto. 2003. *Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Salvatore, D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Erlangga. Jakarta.
- Sinha, Dipendra. (1998). *Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia*. Journal of Economic Development, Vol. 23, Number 2.
- Soepono, Prasetyo, 1999, —*Teori Lokasi: Representsi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14, No.4, 4-24
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Badan Penelitian Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Soebeno, A. 2005. *Analisis Pembangunan Manusia dan Penentuan Prioritas Pembangunan Sosial di Jawa Timur*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2003. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.